

Proses Amdal Masih Lemah Sanksi

Jakarta, Kompas - Buruknya kualitas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal masih belum diikuti ketegasan sanksi. Pembahasan di sidang Komisi Amdal daerah tak jarang justru mengompromikan kesalahan.

Di lapangan kajian amdal bahkan dilakukan di tengah berlangsungnya proyek. Padahal, amdal semestinya dibuat sebelum ada kegiatan pembangunan di lapangan.

"Ada kasus, suatu perusahaan menjiplak persis dokumen amdal di tempat lain, tetapi tak ada sanksi apa pun," kata mantan anggota Komisi Amdal Provinsi Kalimantan Timur, Ade Fadli, yang saat ini menjabat Kepala Departemen Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya Eksekutif Nasional Walhi di Jakarta, Senin (1/9).

Kompromi lain, pimpinan sidang meminta agar proyek yang akan dinilai dapat disetujui karena proyek pemerintah daerah. Ade menyebut contoh kasus pembangunan Bandara Sungai Siring, Samarinda, Kaltim.

Bahkan, proyek atau kegiatan yang tidak melakukan rencana kelola lingkungan/upaya pemantauan lingkungan (RKL/UPL) pun bebas dari sanksi. "Banyak pelanggaran di luar Kaltim," kata Ade yang 13 kali mengikuti sidang Komisi Amdal.

Satu-satunya pembatalan rencana usaha justru karena ketidaklayakan secara ekonomi, bukan karena pertimbangan dampak lingkungan dan sosialnya.

"Mestinya pelanggaran-pelanggaran itu menjadikan daftar hitam bagi perusahaan dan konsultan amdalnya. Ini ternyata tidak sama sekali," tuturnya. Akibatnya adalah berbagai dampak negatif aktivitas usaha terhadap lingkungan dan sosial.

Deputi I Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Hermien Roosita menyatakan, pelanggaran-pelanggaran semacam itu semestinya tidak terjadi. Untuk itu, pihaknya sedang menyusun proses baru, termasuk sanksi bagi pemrakarsa ataupun tim penilai amdal yang meluluskan amdal berpotensi mencemari lingkungan.

Nantinya, amdal juga diarahkan dapat membatalkan sebuah rencana usaha/proyek. Selama ini amdal hanya menjadi salah satu instrumen izin yang tidak signifikan.

Instrumen vital

Dukungan mengangkat peran dokumen amdal diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf.

Amdal seharusnya menjadi instrumen vital sebelum sebuah rencana kegiatan usaha,” ujarnya. Komisi VII di antaranya membidangi persoalan lingkungan hidup. ”Kami siap mendorong amdal menjadi lebih efektif sebagai alat pemerintah melindungi lingkungan,” kata mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid itu.

Dalam kunjungan kerja Komisi VII di Brasil mereka menjumpai Ibama, lembaga perlindungan lingkungan yang berwibawa. Lembaga Ibama dapat membatalkan rencana kegiatan usaha atau apa pun yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan. Bahkan, presiden tak mampu mengintervensi.

”Semestinya di Indonesia juga punya organisasi seperti itu. Syaratnya, berisi orang-orang berintegritas dan berkomitmen,” kata Sonny. Harapan itu diakuinya butuh perjuangan ekstrakeras.

Seperti terungkap dari keterangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, mayoritas (78 persen) amdal di Indonesia dalam kategori buruk dan sangat buruk. Hampir 50 persen, Komisi Penilai Amdal tidak menilai dokumen amdal, melainkan dokumen RKL/UPL. (GSA)